



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

PENGUMUMAN

Nomor : 4/SEK/PENG.KP1.1.6/I/2024

TENTANG

HASIL AKHIR PASCA SANGGAH
PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2023

Merujuk pada Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 1/SEK/PENG.KP1.1.6/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Hasil Akhir Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam tahap akhir pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 telah diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah pada tanggal 13 s.d. 15 Januari 2024 melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Panitia seleksi telah melakukan verifikasi terhadap sanggah peserta pada tanggal 13 s.d. 19 Januari 2024, yang hasilnya dapat dilihat melalui akun masing-masing masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023, untuk segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 23 Januari 2024 s.d. 21 Februari 2024, adapun kelengkapan dokumen yang harus diunggah adalah sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Ketentuan
1.	Pas foto terbaru	- Memakai pakaian kemeja warna putih dengan latar belakang berwarna merah (diwajibkan pas foto studio) - Format file jpeg
2.	Ijazah dan Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar	Scan ijazah dan transkrip nilai asli (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, ijazah dan transkrip nilai yang telah ditetapkan penyetaraannya oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi)



No	Jenis Dokumen	Ketentuan
3.	Daftar Riwayat Hidup (DRH)	Hasil cetak/print out DRH dari laman https://sscASN.bkn.go.id yang pada yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000.
4.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (perihal pengangkatan CPNS)	Masa berlaku sampai dengan Mei 2024
5.	Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani (perihal pengangkatan CPNS)	<ul style="list-style-type: none">- Dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan mulai tanggal 23 Januari 2024.- Jika Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani memiliki nomor surat yang berbeda, Wajib diunggah dengan multipage atau dalam satu file.
6.	Surat Keterangan tidak mengkonsumsi Bebas Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya (perihal pengangkatan CPNS)	Ditandatangani oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah/Pejabat yang berwenang dari badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dibuat dan ditetapkan mulai tanggal 23 Januari 2024.
7.	Surat Pernyataan 5 Poin (lampiran I)	<ul style="list-style-type: none">- Format surat terlampir.- Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial 12, ditandatangani oleh peserta di atas meterai 10.000.
8.	Surat Pernyataan Tidak Meminta Perpindahan Penempatan (lampiran II)	<ul style="list-style-type: none">- Format surat terlampir.- Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial 12, ditandatangani oleh peserta di atas meterai 10.000.

4. Apabila peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir pengadaan CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023, tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana angka 3, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri.

5. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir pengadaan CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000 sesuai format/*template* yang tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran III pengumuman ini, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya. Bagi peserta pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman www.mahkamahagung.go.id.
6. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus dalam tahap akhir pengadaan CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengajukan pengunduran diri atau tidak melapor pada satuan kerja sesuai Keputusan CPNS, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 1 (satu) periode berikutnya dan membayar ganti rugi sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
7. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir pengadaan CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 bersedia menerima segala konsekuensi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS, Pejabat Pembina Kepegawaian Mahkamah Agung RI berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS.
8. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
 - c. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi pengadaan CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.mahkamahagung.go.id. Peserta diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
 - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 tidak dipungut biaya;

- f. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Mahkamah Agung atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 bersifat mutal dan tidak dapat diganggu gugat;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2024

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Selaku
Ketua Panitia Pelaksana Seleksi,



Sugiyanto